

REALISASI ANGGARAN PAJAK DAERAH SURABAYA BERIMPLIKASI PADA KESEJAHTERAAN PUBLIK

Putri Alit Jerryani Azzahra¹, Diyah Ismi Meiylisa², Eva Hany Fanida³,
Melda Fadiyah Hidayat⁴

^{1, 2, 3}Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Email: 25040674371@mhs.unesa.ac.id

Article History

Received: 16-05-2026

Revision: 29-05-2026

Accepted: 31-05-2026

Published: 02-06-2026

Abstract. This article aims to examine the relationship between regional tax management, good governance implementation, and taxpayer compliance levels, as influenced by nationalism. The study employed a literature study method, with data sources consisting of accredited journal articles, academic books, laws and regulations, and official government reports relevant to the research topic. The literature was selected based on its thematic relevance, source credibility, and publication recency. The data were analyzed using content analysis techniques through the stages of identification, classification, evaluation, and synthesis of findings to uncover the relationship between tax management, governance, and taxpayer compliance. The study's results indicate that the quality of public services and the application of good governance principles, such as transparency, accountability, and service effectiveness, play a significant role in increasing public trust in the government. This trust has a positive impact on taxpayer compliance. Furthermore, the study found that understanding the benefits of taxes is insufficient to encourage sustainable compliance without the internalization of nationalism. Nationalism serves as a driving factor for voluntary compliance because it fosters awareness that paying taxes is a form of contribution to national development. Therefore, the synergy between good governance, proportional regulations, and nationalism is key to improving sustainable tax compliance.

Keywords: Local Taxes, Good Governance, Tax Compliance, Nationalism

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pengelolaan pajak daerah, implementasi *good governance*, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor nasionalisme. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan sumber data berupa artikel jurnal terakreditasi, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas sumber, dan keterbaruan publikasi. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, evaluasi, dan sintesis temuan untuk mengungkap hubungan antara pengelolaan pajak, tata kelola pemerintahan, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan penerapan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan, berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan tersebut berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kajian menemukan bahwa pemahaman mengenai manfaat pajak belum cukup untuk mendorong kepatuhan secara berkelanjutan tanpa didukung internalisasi nilai nasionalisme. Nasionalisme berfungsi sebagai faktor pendorong kepatuhan sukarela karena menumbuhkan kesadaran bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Dengan demikian, sinergi antara tata kelola yang baik, regulasi yang proporsional, dan nasionalisme menjadi kunci peningkatan kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Daerah, *Good Governance*, Kepatuhan Pajak, Nasionalisme

How to Cite: Azzahra, P. A. J., Meiylisa, D. I., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). Realisasi Anggaran Pajak Daerah Surabaya Berimplikasi pada Kesejahteraan Publik. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (3), 3839-3846. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i3.5823>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas publik seperti infrastruktur jalan, jembatan, sarana pendidikan, layanan kesehatan, serta program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak secara efektif dan berkelanjutan (Mardiasmo, 2023).

Dalam era otonomi daerah, pajak daerah menjadi salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Tingginya penerimaan pajak daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan masyarakat secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat (Darwin, 2021). Namun demikian, berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Menurut Kirchler et al. (2008), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kualitas pelayanan publik, serta persepsi mengenai manfaat pajak yang dibayarkan. Penelitian Susanto dan Handayani (2022) juga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan pajak dan implementasi prinsip *good governance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, masyarakat cenderung lebih patuh membayar pajak apabila merasakan manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan melalui pelayanan publik yang berkualitas.

Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia memiliki kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang sangat tinggi. Pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta peningkatan aktivitas ekonomi menuntut tersedianya infrastruktur dan layanan publik yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah membutuhkan sumber pendanaan yang besar, salah satunya melalui penerimaan pajak daerah. Namun, peningkatan penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada regulasi perpajakan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas kepatuhan wajib pajak dari aspek pelayanan pajak, sanksi perpajakan, atau kualitas sistem administrasi. Namun, kajian yang mengintegrasikan pengelolaan pajak daerah, implementasi *good governance*, dan faktor

nasionalisme sebagai pendorong kepatuhan wajib pajak masih relatif terbatas. Padahal, nasionalisme dapat menjadi faktor psikologis yang mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah dan negara. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menjelaskan hubungan antara aspek tata kelola pemerintahan, pengelolaan pajak daerah, dan nilai-nilai kebangsaan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pengelolaan pajak daerah, implementasi *good governance*, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor nasionalisme. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong kepatuhan perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) yang bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pengelolaan pajak daerah, implementasi *good governance*, nasionalisme, dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan perpajakan daerah, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan kepatuhan wajib pajak.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, Garuda, SINTA, dan ScienceDirect dengan menggunakan kata kunci *pajak daerah*, *good governance*, *tax compliance*, *taxpayer compliance*, *nasionalisme*, *pelayanan publik*, dan *kepatuhan wajib pajak*. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) relevan dengan fokus penelitian; (2) berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik; (3) dipublikasikan dalam rentang sepuluh tahun terakhir untuk memperoleh informasi yang mutakhir; dan (4) memuat temuan empiris atau kajian konseptual yang mendukung pembahasan penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis meliputi identifikasi literatur, seleksi dan klasifikasi sumber berdasarkan tema penelitian, reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, sintesis hasil kajian, serta penarikan kesimpulan. Melalui proses tersebut, berbagai temuan dari literatur yang berbeda dibandingkan dan diintegrasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai

faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya peran pengelolaan pajak daerah, implementasi *good governance*, dan nilai nasionalisme dalam meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak daerah merupakan salah satu indikator penting dalam implementasi *good governance* yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, dan mudah diakses mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Susanto dan Handayani (2022) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip *good governance* berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena masyarakat lebih bersedia memenuhi kewajibannya ketika merasakan adanya pelayanan yang adil dan profesional. Dengan demikian, pelayanan pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana membangun legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik antara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggunakan prinsip *negative list* dan pajak daerah yang menggunakan prinsip *positive list* memiliki implikasi terhadap pengelolaan penerimaan negara dan daerah. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memungut jenis pajak tertentu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, efektivitas pemungutan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh regulasi, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pajak secara transparan dan mengalokasikannya untuk kebutuhan publik. Apabila masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya, maka tingkat kepercayaan dan kepatuhan cenderung meningkat.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan belum tentu menghasilkan kepatuhan secara otomatis. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pengetahuan, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Dalam konteks ini, nasionalisme berperan sebagai nilai yang mendorong kesadaran individu untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa melalui pembayaran pajak. Temuan ini sejalan dengan konsep *tax morale* yang dikemukakan oleh Torgler (2007), yaitu bahwa kesiediaan seseorang untuk

membayar pajak dipengaruhi oleh nilai moral, rasa memiliki terhadap negara, dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Hubungan antara *good governance*, pengelolaan pajak daerah, dan nasionalisme bersifat saling memperkuat. Implementasi *good governance* meningkatkan kepercayaan masyarakat, pengelolaan pajak yang efektif menunjukkan manfaat nyata bagi publik, sedangkan nasionalisme memperkuat motivasi intrinsik wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Sinergi ketiga aspek tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek pelayanan atau regulasi perpajakan, dengan menunjukkan bahwa faktor nasionalisme juga memiliki peran strategis dalam membentuk kepatuhan perpajakan masyarakat.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Individu yang memahami fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini sejalan dengan Kirchler et al. (2008) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dapat meningkatkan tanggung jawab warga negara dalam membayar pajak. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan saja belum cukup untuk menjelaskan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Torgler (2007) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh *tax morale*, yaitu motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap negara.

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini menemukan bahwa nasionalisme berperan sebagai faktor yang menjembatani hubungan antara pemahaman perpajakan dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan mengenai manfaat pajak tidak selalu menghasilkan kepatuhan apabila tidak disertai rasa memiliki terhadap negara dan kepercayaan kepada pemerintah. Dalam perspektif *tax morale*, kepatuhan tidak hanya didorong oleh sanksi atau pengawasan, tetapi juga oleh kesadaran bahwa kontribusi pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Temuan ini mendukung Torgler (2007) yang menegaskan bahwa kualitas institusi dan nilai sosial memiliki hubungan erat dengan tingkat *tax morale* masyarakat.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa implementasi *good governance* memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik yang pada akhirnya memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif membuat masyarakat lebih mudah melihat manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan. Dalam konteks ini,

pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan berbagai program kesejahteraan sosial menjadi bentuk konkret redistribusi pajak kepada masyarakat. Ketika manfaat tersebut dirasakan secara langsung, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat dan mendorong munculnya kepatuhan yang bersifat sukarela. Temuan ini sejalan dengan penelitian Susanto dan Handayani (2022) yang menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap *tax morale* dan kepatuhan perpajakan.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa nasionalisme tidak hanya berfungsi sebagai nilai ideologis, tetapi juga sebagai faktor psikologis yang memperkuat kesadaran perpajakan. Individu yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa cenderung memandang pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi sosial, bukan sekadar kewajiban administratif. Temuan ini memperluas penelitian sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek regulasi, sanksi, dan pelayanan publik, dengan menunjukkan bahwa faktor kebangsaan memiliki kontribusi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara pengelolaan pajak daerah, implementasi *good governance*, dan nasionalisme dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Literatur sebelumnya umumnya membahas ketiga aspek tersebut secara terpisah, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan terbentuk melalui hubungan yang saling memperkuat antara kualitas tata kelola pemerintahan, manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat, dan internalisasi nilai-nilai nasionalisme. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak serta mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan pajak daerah dan implementasi prinsip *good governance*, tetapi juga oleh faktor nasionalisme sebagai pendorong motivasi intrinsik masyarakat. Penerapan *good governance* melalui pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terbukti berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, kajian ini menemukan bahwa pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak saja belum cukup untuk menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan. Diperlukan internalisasi nilai-nilai nasionalisme agar masyarakat memandang pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan negara.

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa nasionalisme berperan sebagai jembatan antara pengetahuan perpajakan dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kepentingan bangsa, semakin besar kecenderungan masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak perlu dilakukan tidak hanya melalui perbaikan sistem administrasi dan pelayanan, tetapi juga melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran kebangsaan. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa sinergi antara *good governance*, pengelolaan pajak daerah yang efektif, dan nasionalisme merupakan faktor penting dalam membangun kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan serta mendukung pembangunan daerah dan nasional.

REFERENSI

- Karuniawati, S. A. (2016). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha* (Skripsi, STIE Perbanas Surabaya).
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kurniawan, A. (2016). Penerapan e-faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak di Kota Surabaya (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya). *Publika*, 4(2), 1–8.
- Maria, A., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis penerapan e-faktur dalam prosedur dan pembuatan faktur pajak serta pelaporan SPT Masa PPN pada CV Wastu Citra Pratama. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4), 445–455.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1), 1–18.
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua periode 2014–2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145–158.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81–87.
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Susanto, A., & Handayani, R. (2022). Pengaruh *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 1–12.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar Publishing.